

Revitalization of the Values of Ngelamping Ceremony in Cultural Tourism Management in Bali

I Made Sujanayasa¹, I Ketut Suarja², Ni Ketut Riska Dewi Prawita³,

Ni Nyoman Tri Thika Dewanthari⁴, I Putu Ari Utama Irawan⁵

Politeknik Negeri Bali^{1,2,4,5}, UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar³

E-mail: sujanayasa@pnb.ac.id

Abstract

This study examines in the belief that the Ngelamping ceremony, as part of Dewa Yadnya, plays a fundamental role in maintaining the balance of human relations with God, nature, and community. The tradition is not merely a religious expression but also an act of gratitude among Balinese agrarian communities for abundant harvests. The research employed a qualitative method through literature review and participatory observation in Bukian Traditional Village. The findings reveal that Ngelamping has a strong theological foundations based on yadnya, embodies fertility symbols through ritual offerings (upakara), and functions as a medium to strengthen social solidarity and customary institutions. Furthermore, its implementation based on the Balinese wariga calendar (the traditional Balinese calendrical system) underscores the importance of cosmic harmony in Balinese life. These findings highlight the relevance of Ngelamping as a cultural heritage that is both sacred and strategic for identity preservation and sustainable development.

Keywords: Balinese tradition, cultural heritage, Dewa Yadnya, fertility, Ngelamping



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits (attribution) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

Pendahuluan

Pulau Bali sejak lama dikenal sebagai pusat kebudayaan yang unik dengan perpaduan erat antara kehidupan sosial, adat, dan religiusitas Hindu yang melekat pada setiap aktivitas masyarakatnya. Identitas kultural ini tidak hanya menjadikan Bali sebagai wilayah dengan praktik keagamaan yang intens, tetapi juga sebagai destinasi pariwisata budaya yang mendunia (Koentjaraningrat, 1990). Salah satu aspek penting dalam konstruksi budaya Bali adalah keberadaan subak organisasi sosial religius yang tidak hanya mengatur sistem irigasi pertanian, melainkan juga menjiwai praktik spiritual masyarakat melalui berbagai ritual yang diwariskan turun-temurun (Windia et al., 2005). Di antara ragam ritual tersebut, Upacara Ngelamping menempati posisi istimewa sebagai bentuk Dewa Yajña yang dilaksanakan oleh Krama Subak Bukian sebagai ungkapan syukur atas keberhasilan panen sekaligus sebagai upaya menjaga keseimbangan ekologis dan kosmologis.

Akan tetapi, derasnya arus globalisasi, alih fungsi lahan pertanian, dan berkurangnya minat generasi muda terhadap dunia agraris memunculkan tantangan serius bagi keberlanjutan tradisi ini. Paradoks ini kian tajam ketika di satu sisi Subak telah diakui UNESCO sebagai Cultural Landscape of Bali Province: Subak as a Manifestation of Tri Hita Karana Philosophy, namun di sisi lain eksistensinya mulai tergerus oleh modernisasi dan ekspansi pariwisata (Sarita & others, 2013). Dalam konteks inilah, penelitian mengenai revitalisasi nilai-nilai Upacara Ngelamping menjadi penting, tidak hanya untuk mempertegas identitas religio-kultural Bali, tetapi juga untuk memberikan arah pengelolaan pariwisata budaya yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Meskipun Upacara Ngelamping di Subak Bukian masih lestari hingga kini, terdapat indikasi pelunturan makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Generasi muda, yang semestinya menjadi pewaris utama tradisi agraris-religius ini, cenderung teralienasi oleh arus globalisasi, gaya hidup modern, dan daya tarik sektor non-pertanian. Pada saat yang sama, ekspansi pariwisata budaya menimbulkan tarik-menarik antara kebutuhan pelestarian tradisi dengan kecenderungan komersialisasi ritual. Sejalan dengan (Sztompka, 2007) bahwa fenomena alih fungsi lahan sawah menjadi fasilitas pariwisata, serta masuknya nilai-nilai eksternal yang sering kali kurang sejalan dengan kearifan lokal, semakin memperkuat kontradiksi tersebut. Akibatnya, masyarakat menghadapi dilema: di satu sisi, upacara Ngelamping berfungsi sebagai benteng spiritual yang menopang eksistensi Subak; namun di sisi lain, keberlanjutannya terancam oleh melemahnya ikatan sosial-religius yang menjadi dasar pelaksanaannya

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini secara eksplisit bertujuan untuk menelaah eksistensi Upacara Ngelamping dalam konteks sosio-religius dan budaya di Subak Bukian, Desa Adat Bukian. Tujuan utama penelitian adalah menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi keberlangsungan tradisi ini, sekaligus mendeskripsikan proses ritual yang dijalankan masyarakat secara turun-temurun. Selain itu, penelitian ini berupaya mengungkap implikasi filosofis, religius, dan sosial dari Upacara Ngelamping, baik bagi ketahanan sistem subak maupun bagi kehidupan spiritual masyarakatnya. Dari perspektif yang lebih luas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengelolaan pariwisata budaya di Bali, yaitu dengan menawarkan model pelestarian yang menempatkan nilai-nilai ritual agraris sebagai fondasi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini bukan hanya bersifat deskriptif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab kebutuhan harmonisasi antara pelestarian tradisi lokal dengan dinamika pariwisata global

Kajian mengenai subak di Bali telah banyak dilakukan, terutama terkait fungsi sosial, ekonomi, dan ekologisnya sebagai sistem irigasi tradisional yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana (Windia, 2013). Beberapa penelitian juga menyoroti dampak alih fungsi lahan dan tekanan pariwisata terhadap keberlanjutan subak. Namun demikian, masih sedikit kajian yang secara khusus menyoroti dimensi ritual agraris, khususnya Upacara Ngelamping, sebagai instrumen spiritual yang menopang eksistensi subak sekaligus menjaga keseimbangan ekologis. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek struktural atau material dari subak, sementara dimensi simbolik dan religius upacara Ngelamping belum mendapat perhatian yang memadai. Celah inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini, dengan mengkaji revitalisasi nilai-nilai Ngelamping dalam kerangka pengelolaan pariwisata budaya. Penelitian ini diharapkan mampu memperluas cakrawala akademik melalui pemahaman holistik tentang hubungan antara ritual agraris, pelestarian budaya, dan dinamika pariwisata di Bali

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam menempatkan Upacara Ngelamping bukan hanya sebagai ritual agraris yang bersifat lokal, melainkan sebagai sumber nilai yang relevan dengan pengelolaan pariwisata budaya kontemporer. Perspektif ini berbeda dari kajian sebelumnya yang cenderung memusatkan perhatian pada aspek teknis subak atau pada dampak sosial-ekonomi dari pariwisata, tanpa memberikan perhatian memadai pada dimensi religius dan simbolik dari ritual agraris. Justifikasi akademiknya terletak pada kontribusi penelitian ini dalam memperkaya literatur tentang hubungan antara spiritualitas Hindu Bali, sistem subak, dan pariwisata budaya, sekaligus menghadirkan analisis teoretis berbasis religiusitas dan semiotika ritual. Sementara itu, secara praktis penelitian ini penting bagi masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan pariwisata karena dapat menjadi landasan dalam merumuskan strategi pelestarian budaya yang tidak hanya menekankan aspek material, tetapi juga menjaga makna filosofis upacara. Dengan cara ini, revitalisasi nilai-nilai Upacara Ngelamping dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memastikan keberlanjutan tradisi sekaligus mendukung pariwisata budaya Bali yang berkarakter dan berkeadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena keberlangsungan dan revitalisasi nilai-nilai Upacara Ngelamping di Subak

Bukian, Desa Adat Bukian, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada sifat objek penelitian yang bersifat naturalistik, yakni berkaitan dengan praktik ritual keagamaan yang hidup di tengah masyarakat dan sarat makna simbolis. Data dikumpulkan bukan dalam bentuk angka, melainkan berupa deskripsi, narasi, dan interpretasi dari pengalaman, pandangan, serta praktik masyarakat terkait upacara ini. Sebagai instrumen utama, peneliti berperan langsung dalam proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi, sehingga mampu menangkap realitas sosial-religius secara lebih kontekstual dan menyeluruh.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif, yakni di Desa Adat Bukian, Desa Pelaga, karena wilayah ini masih secara konsisten melaksanakan Upacara Ngelamping sebagai bagian integral dari sistem subak. Pemilihan lokasi ini penting mengingat Desa Pelaga merupakan salah satu kawasan agraris yang menghadapi tantangan besar akibat alih fungsi lahan dan menurunnya minat generasi muda terhadap pertanian. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kelihan Subak, pemangku pura, prajuru desa, dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari literatur, laporan penelitian terdahulu, foto, serta dokumen-dokumen terkait. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan deduktif-induktif untuk menemukan pola, makna, dan implikasi yang terkait dengan peran Upacara Ngelamping dalam menjaga identitas religio-kultural masyarakat sekaligus relevansinya bagi pengelolaan pariwisata budaya.

Hasil dan Pembahasan

1. Landasan Teologis Yadnya & Posisi Ngelamping (Dewa Yadnya)

Dalam ajaran agama Hindu, yadnya dipandang sebagai inti dari praktik keagamaan yang berfungsi sebagai sarana penyucian diri sekaligus kewajiban spiritual umat manusia terhadap Tuhan, leluhur, dan sesama makhluk. Secara etimologis, kata yadnya berasal dari bahasa Sanskerta “yaj” yang berarti “korban suci” atau “persembahan” (Surayin, 2004). Korban suci ini tidak hanya berupa sajian ritual seperti banten, melainkan mencakup seluruh bentuk pengabdian, kebajikan, dan dana punia yang dilakukan dengan hati tulus ikhlas tanpa pamrih (Wiana, 1995). Oleh karena itu, yadnya tidak semata dipahami sebagai aktivitas ritual, tetapi sebagai fondasi etis dan teologis yang menuntun manusia menuju kesempurnaan hidup.

Dalam tradisi Hindu, praktik yadnya didasarkan pada kesadaran akan tiga hutang kosmik yang disebut Tri R̥ṇa: (1) Dewa R̥ṇa yaitu hutang kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan seluruh manifestasi-Nya, (2) Pitra R̥ṇa yaitu hutang kepada para leluhur, serta (3) Ṛṣi R̥ṇa yaitu hutang pengetahuan kepada para Ṛṣi yang mewariskan wahyu dan Weda (Surayin, 2004). Konsep Tri R̥ṇa inilah yang menegaskan mengapa yadnya menjadi kewajiban mutlak dalam kehidupan religius umat Hindu. Dengan melaksanakan yadnya, manusia bukan hanya membalas hutang-hutang kosmik tersebut, tetapi juga menjaga harmoni antara dimensi transenden, leluhur, dan komunitas sosial.

Teks-teks klasik Hindu memberikan landasan teologis yang kuat bagi kewajiban melaksanakan yadnya. Dalam Manawadharmaśāstra, disebutkan bahwa hidup makhluk adalah hasil dari upacara korban suci, sedangkan mereka yang mengabaikan tapa, dana, dan yadnya tidak akan memperoleh kebahagiaan, baik di dunia kini maupun di dunia kemudian (Wiana, 1995). Demikian pula dalam Bhagavadgītā III.11 dinyatakan: “Devan bhavayata nena te deva bhavayantu vah, parasparam bhavayantah sreya param avapsyatha” yang berarti “Dengan yadnya engkau memelihara para dewa, maka para dewa pun akan memelihara engkau. Dengan saling memelihara demikian, engkau akan mencapai kebajikan tertinggi” (Sivananda, 2000). Kutipan ini menegaskan hubungan timbal balik antara manusia dengan kekuatan ilahi melalui yadnya.

Bagi umat Hindu di Bali, pelaksanaan yadnya sangat nyata dalam bentuk Panca Yadnya: Dewa Yadnya, Rsi Yadnya, Pitra Yadnya, Manusa Yadnya, dan Bhuta Yadnya (Surayin, 2004). Dari kelima yadnya tersebut, Dewa Yadnya memiliki kedudukan penting karena ditujukan langsung kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dengan segala manifestasi-Nya. Bentuk lahiriah dari Dewa Yadnya di Bali sering diekspresikan melalui persembahan banten, tarian sakral, hingga ritual agraris yang melibatkan

siklus pertanian (Windia, 2013). Dalam konteks inilah, Upacara Ngelamping diposisikan sebagai bentuk Dewa Yadnya yang berhubungan erat dengan Dewi Sri sebagai sakti Dewa Wisnu, dewi kesuburan dan kemakmuran. Persembahan emping (geti-geti) dan banten inti dalam Ngelamping merupakan simbol rasa syukur umat atas keberhasilan panen serta permohonan keberkahan untuk siklus pertanian berikutnya. Secara filosofis, Ngelamping mengintegrasikan dimensi teologis (bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa), etis (kesadaran Tri Rṇa), dan ekologis (keselarasan dengan alam melalui pemuliaan Dewi Sri).

Ajaran yadnya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai pendidikan spiritual dan sosial. Wiana, (1995) menekankan bahwa yadnya membebaskan manusia dari “perbudakan harta benda” dengan mengajarkan pengendalian diri serta kesadaran menjaga bumi sebagai tempat berpijak. Dengan demikian, melalui praktik-praktik yadnya, termasuk Ngelamping, umat Hindu diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara dunia transenden, komunitas sosial, dan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan pandangan antropologi ritual yang melihat upacara sebagai medium simbolik untuk memelihara keteraturan sosial sekaligus kosmik (Koentjaraningrat, 2009). Sehingga landasan teologis yadnya tidak hanya memberikan legitimasi religius bagi praktik Ngelamping, tetapi juga menjelaskan fungsinya sebagai wujud pengabdian, syukur, dan pemeliharaan kehidupan. Ngelamping bukan sekadar ritual agraris, melainkan ekspresi nyata dari prinsip paras-paros sarpanaya (saling menghidupi) yang menyatukan manusia, alam, dan Tuhan. Melalui ritual ini, masyarakat Bali memperkuat identitas religius sekaligus menjaga kesinambungan ekologis yang menopang kehidupan pertanian dan budaya mereka.

2. Makna Simbolik & Semiotika Upakara Ngelamping

Dalam kajian ritual Hindu di Bali, upakara atau banten dipahami bukan hanya sebagai persembahan material, melainkan juga sebagai media simbolik yang memuat pesan-pesan teologis, etis, dan kosmologis. Upakara menjadi “bahasa tanda” yang menjembatani komunikasi manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa beserta manifestasi-Nya. Sebagaimana dikemukakan oleh van Zoest, (1993) simbol dan tanda dalam upacara agama berfungsi sebagai representasi makna yang lebih dalam, di mana objek material berperan sebagai penanda realitas transenden. Hal ini menunjukkan bahwa makna upakara tidak berhenti pada bentuk lahiriahnya, tetapi mencerminkan dimensi filosofis dan spiritual yang lebih luas. Dalam konteks Upacara Ngelamping, berbagai jenis upakara seperti emping (geti-geti), daksina, peras, tebasan, segehan warna lima, hingga canang burat wangi memiliki makna simbolik yang saling melengkapi. Emping yang terbuat dari beras atau jagung merupakan ikon kesuburan dan hasil bumi, sekaligus representasi Dewi Sri sebagai sakti Dewa Wisnu yang menjaga keberlangsungan kehidupan agraris (Surayin, 2004). Dengan mempersembahkan emping, masyarakat Bali sesungguhnya sedang meneguhkan hubungan timbal balik antara manusia dengan kekuatan alam dan kosmos yang menopang pertanian. Sejalan dengan itu, daksina dipahami sebagai simbol penyatuan purusha prakriti atau spirit materi, yang menegaskan keberadaan manusia dalam hubungan harmonis dengan Tuhan (Putra et al., 2016).

Menurut Wiana,(1995) banten dalam tradisi Bali memiliki tiga fungsi pokok: (1) sebagai sarana menyatakan rasa terima kasih kepada Tuhan, (2) sebagai media pendidikan spiritual yang melatih konsentrasi dan ketulusan, serta (3) sebagai wujud nyata dari kehadiran kekuatan ilahi. Fungsi-fungsi ini tampak jelas dalam tata upakara Ngelamping yang melibatkan banyak jenis persembahan, di mana setiap unsur memiliki arti spesifik sekaligus menjadi bagian dari kesatuan yang utuh. Dengan demikian, upakara tidak hanya sarana ritual, tetapi juga menjadi instrumen pedagogis yang menanamkan nilai religius dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kajian antropologi ritual menekankan bahwa upakara dalam agama Hindu di Bali adalah bentuk semiotika religius yang mengartikulasikan pandangan hidup masyarakat. Koentjaraningrat (2009) melihat bahwa simbol-simbol ritual adalah “alat komunikasi budaya” yang mengikat komunitas dalam nilai bersama. Melalui praktik Ngelamping, masyarakat Bali menyampaikan rasa syukur, doa, sekaligus memperkuat identitas kolektif mereka sebagai komunitas agraris religius. Hal ini selaras

dengan pandangan Geertz, (1973) bahwa ritual adalah “model of” dan “model for” reality, yakni sekaligus merepresentasikan realitas sosial dan mengarahkan tindakan sosial.

Berdasarkan wawancara dengan pemangku Desa, Upakara Ngelamping juga menunjukkan keterkaitan erat antara kosmologi Hindu dan ekologi pertanian. Simbol-simbol yang digunakan tidak hanya menghubungkan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menegaskan kesadaran ekologis dalam menjaga alam. Misalnya, segehan warna lima yang ditempatkan di halaman pura melambangkan harmonisasi lima unsur (panca mahabhuta) yang menopang kehidupan. Dengan cara ini, ritual Ngelamping berfungsi sebagai mekanisme religius untuk menanamkan kesadaran ekologis kepada masyarakat agraris (wawancara 5 Januari 2026). Pandangan ini diperkuat oleh kajian Windia, (2013) mengenai subak, di mana ritual pertanian Bali menjadi fondasi kultural bagi keberlanjutan ekosistem sawah.

Makna simbolik dan semiotika upakara dalam Upacara Ngelamping dapat dipahami pada tiga level: (1) teologis, yaitu relasi manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa melalui persembahan suci; (2) etis-pedagogis, yaitu pembentukan karakter masyarakat yang penuh rasa syukur, disiplin, dan pengendalian diri; serta (3) ekologis-kultural, yaitu penguatan harmoni antara manusia, alam, dan komunitas melalui praktik kolektif yang berulang. Ketiga dimensi ini menjadikan Ngelamping bukan hanya sebagai ritus agraris, tetapi juga sebagai sistem simbol yang melestarikan pengetahuan, nilai, dan identitas religius masyarakat Bali.

3. Tipologi Upacara Padi & Posisi Ngelamping dalam Siklus Agraris

Dalam tradisi agraris masyarakat Bali, siklus pertanian tidak hanya dipandang sebagai proses ekonomi, tetapi juga sebagai proses religius yang sarat makna simbolis. Setiap tahapan dalam pertanian padi disertai dengan pelaksanaan upacara yang bertujuan menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan.

Berdasarkan wawancara dengan Bendesa Adat menyatakan bahwa siklus pertanian dalam masyarakat Bali dipahami sebagai proses religius yang terintegrasi dalam struktur adat. Pertanian tidak hanya diposisikan sebagai aktivitas ekonomi, tetapi sebagai bagian dari yadnya yang memuliakan siklus kehidupan padi. Ngelamping dimaknai sebagai puncak rasa syukur kolektif atas panen, di mana emping sebagai hasil bumi dipersembahkan kembali kepada Dewi Sri sebagai simbol kesadaran transendental atas sumber kesuburan. Bendesa Adat juga menegaskan bahwa siklus padi dipahami secara metaforis sebagai representasi siklus kehidupan manusia lahir, tumbuh, berbuah, dan kembali ke asal (wawancara 5 Januari 2026). Hal ini sesuai dengan pandangan (Geertz, 1973) yang menekankan bahwa ritual agraris di Bali merupakan “cultural performance” yang tidak sekadar berfungsi praktis, melainkan juga memperkuat tatanan kosmos. Menurut (Surayin, 2004) terdapat sejumlah besar upacara yang dilakukan mulai dari persiapan tanah hingga panen dan penyimpanan hasil, di antaranya: nugraha pangerep (persiapan lahan), ngendagin (penanaman), ngusaba (masa pertumbuhan), hingga ngusaba nini atau mapag sri sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Sri menjelang panen.

Upacara Ngelamping menempati posisi penting dalam tipologi ritual padi tersebut, karena dilaksanakan sebagai puncak rasa syukur atas keberhasilan panen. Istilah ngelamping sendiri merujuk pada penggunaan emping (geti-geti) yang dibuat dari hasil panen sebagai persembahan utama (Windia, 2013) Dengan mempersembahkan emping kepada Dewi Sri, masyarakat petani menegaskan keyakinan bahwa kesuburan dan hasil bumi bukan hanya hasil kerja manusia, tetapi juga berkat restu kekuatan ilahi. Di sinilah terlihat bahwa Ngelamping tidak sekadar perayaan panen, melainkan ritual transendental yang memuliakan siklus hidup padi sebagai simbol kehidupan itu sendiri (Putra, 2004).

Jika ditinjau dari perspektif semiotika agraris, Ngelamping merupakan representasi dari “siklus kelahiran dan kematian” padi yang paralel dengan siklus kehidupan manusia. Padi yang ditanam, tumbuh, dipanen, lalu dipersembahkan dalam bentuk emping menjadi metafora bagi perjalanan spiritual manusia dari lahir hingga kembali ke asal. Hal ini selaras dengan konsep Tri Hita Karana, di mana hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (parhyangan), sesama (pawongan), dan alam (palemahan) direalisasikan melalui ritus-ritus agraris (Windia, 2006). Sehingga

posisi Ngelamping dalam tipologi upacara padi memperlihatkan fungsi ganda: di satu sisi sebagai syukur kolektif atas hasil panen, dan di sisi lain sebagai ritual kosmologis yang meneguhkan keberadaan masyarakat agraris Bali dalam bingkai religiusitas Hindu. Hal ini menegaskan bahwa upacara agraris tidak hanya melestarikan sistem pertanian tradisional, tetapi juga menjadi media transmisi nilai-nilai filosofis, etis, dan ekologis yang diwariskan lintas generasi.

4. Wariga & Penetapan Waktu: Purnamaning Sasih Kedasa

Penentuan waktu pelaksanaan upacara dalam tradisi Hindu Bali memiliki makna yang sangat mendalam karena selalu berpijak pada wariga, yaitu sistem penanggalan tradisional yang menggabungkan unsur astronomi, kosmologi, serta keyakinan religius. Wariga bukanlah kalender biasa, melainkan suatu sistem yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan kosmos. Untara, (2025) menjelaskan bahwa wariga mencerminkan filosofi Hindu tentang keteraturan alam semesta atau *rta*, yaitu hukum kosmik yang mengatur peredaran matahari, bulan, dan bintang, sekaligus mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan demikian, setiap gerakan langit diyakini memiliki resonansi langsung terhadap kondisi spiritual maupun material umat manusia.

Dalam praktik keagamaan Hindu Bali, wariga digunakan untuk memilih dewasa ayu atau hari baik bagi pelaksanaan berbagai bentuk yadnya. Pemilihan waktu bukan bersifat sembarangan, tetapi dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap keteraturan kosmik. Upacara yang dilakukan pada waktu yang tepat diyakini akan mendapat restu dari para dewa serta membawa kesejahteraan bagi manusia. Sebaliknya, pelaksanaan pada waktu yang tidak sesuai dianggap berpotensi mengganggu keseimbangan kosmis dan menghasilkan akibat yang kurang baik. Karena itu, wariga tidak hanya menjadi acuan kalender ritual, melainkan juga instrumen religius sekaligus sosial yang mengatur ritme kehidupan masyarakat Bali.

Dalam konteks Upacara Ngelamping, waktu yang paling utama dan umum dipilih adalah Purnamaning Sasih Kedasa. Purnama atau bulan purnama dipandang sebagai fase kosmis di mana energi alam semesta mencapai puncaknya. Cahaya bulan penuh diyakini sebagai simbol kesempurnaan, pencerahan, sekaligus pembersihan batin. Sementara itu, Sasih Kedasa yang biasanya jatuh sekitar bulan Maret hingga April dianggap sebagai bulan suci yang identik dengan kesuburan, pembersihan diri, serta penyucian jagat. Titib, (2003) menyebut Sasih Kedasa sebagai momen di mana bumi berada dalam keadaan “kedas” atau bersih, sehingga menjadi saat yang ideal untuk melaksanakan Dewa Yadnya. Oleh karena itu, pemilihan Purnama Kedasa untuk Ngelamping memiliki makna ganda: sebagai ritus syukur atas hasil pertanian dan sebagai upaya menyelaraskan diri dengan siklus kosmik alam semesta.

Keterkaitan ini semakin jelas bila dihubungkan dengan pemujaan Dewi Sri, yang dalam tradisi Bali dipandang sebagai sakti Dewa Wisnu serta simbol kesuburan dan kemakmuran. Wawancara dengan Kelian Subak menyatakan bahwa wariga dipahami sebagai sistem kosmologis yang mengintegrasikan peredaran benda langit dengan ritme kehidupan agraris. Penentuan Purnamaning Sasih Kedasa sebagai waktu utama Ngelamping dimaknai sebagai momen penyelarasan antara ritus syukur panen dengan puncak energi kosmis. Kelian Subak menegaskan bahwa bulan purnama melambangkan kesempurnaan dan penyucian, sedangkan Sasih Kedasa dipahami sebagai periode “kedas” atau bersih, sehingga ideal untuk pelaksanaan Dewa Yadnya (wawancara 10 Januari 2026). Pandangan itu sejalan dengan pemikiran Windia, (2006) bahwa berbagai upacara pertanian di Bali, termasuk Ngelamping, sering dipusatkan pada Purnama Kedasa karena diyakini sebagai saat paling tepat untuk memohon restu kesuburan. Dengan demikian, pemilihan waktu ritual tidak hanya sekadar konvensi, tetapi mencerminkan integrasi antara siklus agraris dengan kosmologi Hindu.

Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penetapan waktu tidak selalu kaku. Faktor *kāla deśa pātra* (situasi, tempat, dan kondisi) kerap menjadi pertimbangan penting. Misalnya, apabila panen raya (*kertamasa*) terjadi lebih awal, atau ketika terdapat cuntaka (halangan ritual akibat peristiwa kematian atau kelahiran di desa), maka pelaksanaan Ngelamping dapat diundur dari Purnama Kedasa. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa tradisi Bali memiliki sifat adaptif, bukan statis. Covarrubias, (1972) dalam kajiannya tentang kebudayaan Bali menekankan bahwa masyarakat

Bali memiliki kemampuan menyesuaikan ritual dengan konteks sosial-ekologis tanpa mengurangi nilai sakralitasnya.

Selain pemilihan momen Purnama Kedasa, wariga juga memperhatikan berbagai larangan dan pantangan, seperti ingkel tertentu yang dianggap kurang baik untuk melaksanakan aktivitas agraris maupun ritual. Ingkel- ingkel ini terkait dengan aspek kosmologis dan simbolis; misalnya, ada hari yang dianggap ala ayuning dewasa (hari tidak baik) untuk menanam atau memanen, sehingga secara otomatis juga dihindari sebagai waktu upacara. Hal ini memperlihatkan bahwa wariga tidak hanya berfungsi sebagai kalender spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial ekologis yang mengatur aktivitas masyarakat agar selaras dengan kosmos.

Dengan memilih Purnamaning Sasih Kedasa sebagai waktu utama pelaksanaan Ngelamping, masyarakat Bali menegaskan keterhubungan yang erat antara ritus agraris, siklus pertanian, dan keteraturan kosmik. Praktik ini memperlihatkan bahwa upacara agraris tidak hanya berorientasi pada hasil panen material, tetapi juga pada pemeliharaan harmoni kosmis yang diyakini menopang keberlangsungan hidup manusia. Pada tataran filosofis, penetapan waktu berbasis wariga dapat dipahami sebagai upaya kolektif untuk menjaga keselarasan hubungan antara Parhyangan (hubungan dengan Tuhan), Pawongan (hubungan antar manusia), dan Palemahan (hubungan dengan alam). Dengan demikian, wariga menjadi instrumen integratif yang menegaskan pentingnya prinsip Tri Hita Karana dalam kehidupan masyarakat Bali.

Dari perspektif antropologi ritual, pemilihan Purnama Kedasa juga memperlihatkan fungsi simbolik dari kalender tradisional sebagai sarana memperkuat identitas kultural. Kalender Bali tidak hanya dipakai untuk kepentingan religius, tetapi juga sebagai penanda siklus kehidupan agraris, pengatur aktivitas kolektif, sekaligus perekat kohesi sosial. Dengan demikian, wariga tidak sekadar menentukan kapan upacara dilaksanakan, melainkan juga meneguhkan ikatan sosial, ekologis, dan spiritual masyarakat Bali.

5. Tata Laksana Ritus & Partisipasi Komunitas

Pelaksanaan Upacara Ngelamping mencerminkan keteraturan ritual masyarakat agraris Bali yang sarat makna religius, sosial, dan kultural. Secara umum, tata laksana Ngelamping terdiri dari tiga tahapan pokok, yaitu matur piuning (permohonan restu), puncak upacara (persembahan emping dan banten inti), serta ngantukang (pengembalian simbolis Bhatare ke pelinggih-Nya). Tahap matur piuning berfungsi sebagai komunikasi awal kepada para dewa dan leluhur, menandakan kesiapan umat dalam melaksanakan yadnya. Pada tahap puncak, seluruh komponen banten dipersembahkan, termasuk emping geti-geti, daksina, segehan, dan peras yang melambangkan kesyukuran atas hasil panen.

Hal tersebut dipertegas berdasarkan wawancara dengan Pemangku Pura Desa menyampaikan bahwa tata laksana Ngelamping dijalankan secara sistematis melalui tiga tahapan utama: matur piuning, puncak persembahan, dan ngantukang. Tahap matur piuning dimaknai sebagai komunikasi awal dengan kekuatan ilahi dan leluhur, sedangkan puncak upacara menempatkan emping sebagai simbol syukur atas hasil pertanian yang dipadukan dengan daksina, peras, dan segehan sebagai peneguh keseimbangan kosmis (wawancara, 12 Januari 2026). Adapun tahap ngantukang menegaskan penutupan ritus dengan mengembalikan keseimbangan sakral setelah prosesi selesai (Surayin, 2004).

Tata laksana ini tidak hanya berfokus pada aspek religius, melainkan juga merepresentasikan partisipasi komunal yang kuat. Seluruh krama subak, pemangku pura, serta prajuru desa adat terlibat aktif dalam setiap tahapan. Hal ini sesuai dengan konsep ngayah, yakni pengabdian tulus ikhlas tanpa pamrih sebagai wujud bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Menurut Wiana, (1995), ngayah dalam konteks yadnya mengandung makna ganda: sebagai sarana spiritual bagi individu dan sebagai mekanisme memperkuat kohesi sosial sehingga partisipasi komunitas dalam Ngelamping bukan hanya kewajiban adat, melainkan juga bentuk pendidikan nilai kebersamaan dan solidaritas. Pelaksanaan upacara di Pura Desa atau Bale Agung menegaskan fungsi ruang sakral sebagai pusat kosmologis desa adat. Di tempat inilah masyarakat berkumpul, mempersembahkan yadnya, sekaligus memperkuat identitas kolektif sebagai komunitas agraris religius. Geertz, (1973) menekankan bahwa ritual Bali selalu

bersifat teatral, bukan dalam arti hiburan, melainkan sebagai “drama kosmik” yang menampilkan keterhubungan manusia dengan alam dan Tuhan. Dengan demikian, tata laksana Ngelamping bukan hanya rangkaian teknis upacara, melainkan ekspresi budaya yang menyatukan teologi, kosmologi, dan kehidupan sosial masyarakat Bali.

6. Konteks Sosial Kelembagaan & Pembiayaan Upacara

Upacara Ngelamping tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan kelembagaan adat yang menopang keberlangsungannya. Sebagai bagian dari tradisi agraris Bali, Ngelamping memiliki akar kuat pada dua institusi utama, yakni desa adat dan subak. Desa adat berfungsi sebagai lembaga sosial-religius yang mengatur kehidupan keagamaan, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Sementara itu, subak merupakan organisasi agraris tradisional yang mengelola sistem irigasi sekaligus memelihara hubungan religius antara petani, tanah, dan Tuhan. Hal itu sejalan dengan wawancara Kelian Subak menyatakan bahwa keberlangsungan Ngelamping ditopang oleh sinergi antara desa adat dan subak sebagai dua institusi utama masyarakat agraris Bali. Subak tidak hanya berfungsi sebagai lembaga teknis pengelolaan irigasi, tetapi sebagai sistem sosio-religius serta Kelian Subak menegaskan bahwa koordinasi antara prajuru desa adat dan pengurus subak memastikan legitimasi ritual serta kepatuhan terhadap awig-awig (wawancara 10 Januari 2026). Dalam penelitian klasik Lansing, (2007) subak dipahami bukan sekadar lembaga teknis untuk distribusi air, melainkan sistem sosio-religius yang mengatur keseimbangan ekologi sekaligus memastikan terlaksananya berbagai upacara pertanian. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan Ngelamping tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan manifestasi dari sinergi kelembagaan adat yang kokoh.

Dalam pelaksanaan Ngelamping, prajuru desa adat berperan penting untuk menjaga tata tertib ritual, memastikan pemenuhan awig-awig (aturan adat), serta mengoordinasikan keterlibatan masyarakat. Bersama dengan pengurus subak, mereka mengatur jadwal pelaksanaan, menentukan jenis banten (sesajen) yang harus dipersiapkan, hingga membagi tugas di antara warga. Kelembagaan adat ini berfungsi sebagai penopang utama yang menjamin keteraturan sekaligus keabsahan upacara. Sebagaimana dicatat oleh Geertz, (1973) dalam masyarakat Bali struktur adat bukan hanya sistem administratif, tetapi juga kerangka simbolik yang memberi makna bagi setiap praktik religius. Ngelamping dengan demikian menjadi titik temu antara fungsi kelembagaan dan ekspresi spiritual komunitas agraris.

Dari sisi sosial, partisipasi masyarakat dalam Ngelamping bersifat kolektif dan didasarkan pada prinsip gotong royong. Krama subak dan warga desa adat terlibat langsung dalam setiap tahapan, baik melalui tenaga, waktu, maupun sumber daya. Praktik ngayah, yaitu pengabdian sukarela tanpa pamrih, menjadi ciri khas dalam pelaksanaan ritual ini. Wiana, (1995) menegaskan bahwa ngayah tidak semata aktivitas sosial, tetapi merupakan wujud bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta bentuk solidaritas sosial yang memperkuat kohesi komunitas. Melalui ngayah, upacara tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan memperkuat identitas religio kultural masyarakat Bali. Hal ini juga sejalan dengan konsep komunitas yang dikemukakan Turner, (1970) di mana partisipasi kolektif dalam ritual melahirkan rasa kesetaraan, persaudaraan, dan keterhubungan spiritual.

Selain aspek sosial, mekanisme pembiayaan upacara Ngelamping mencerminkan kemandirian ekonomi komunitas adat. Dana diperoleh dari berbagai sumber, antara lain kas desa adat, iuran atau pepesuan para pemilik lahan pertanian, serta sumbangan sukarela dari warga. Model finansial ini menunjukkan adanya sistem distribusi kewajiban yang adil dan proporsional, di mana setiap warga berkontribusi sesuai dengan kapasitas ekonominya. Windia, (2013) menegaskan bahwa pola pembiayaan berbasis gotong royong merupakan salah satu faktor penting yang menjamin kesinambungan ritual meskipun masyarakat menghadapi tekanan ekonomi modern. Dengan mekanisme ini, upacara tetap dapat dijalankan tanpa harus bergantung pada dukungan eksternal, sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap tradisi.

Prinsip keadilan distributif yang melekat dalam pembiayaan Ngelamping juga memperlihatkan bagaimana nilai religius bertransformasi menjadi praktik sosial-ekonomi. Masyarakat

tidak hanya terikat secara spiritual, tetapi juga secara finansial dan sosial dalam menjaga kelestarian tradisi. Hal ini memperlihatkan integrasi antara aspek ritual dan aspek kesejahteraan, di mana upacara menjadi arena untuk memperkuat solidaritas, mempraktikkan prinsip kesetaraan, dan meneguhkan kohesi sosial. Dengan demikian, konteks kelembagaan adat dan sistem pembiayaan gotong royong menjadikan Ngelamping lebih dari sekadar ritual keagamaan, melainkan juga mekanisme sosial yang menyeimbangkan kebutuhan spiritual, sosial, dan ekonomi komunitas. Lebih jauh, keterlibatan masyarakat dalam Ngelamping juga berfungsi sebagai arena pendidikan kultural. Anak-anak dan remaja belajar mengenai nilai ngayah, makna simbolik banten, serta aturan adat melalui keterlibatan langsung. Proses ini menjadi sarana transfer nilai lintas generasi, memastikan bahwa upacara tetap hidup meski menghadapi tantangan modernisasi. Revitalisasi nilai seperti ini sejalan dengan pandangan Hobsbawm & Ranger, (1983) mengenai "invention of tradition," di mana tradisi tidak hanya diwariskan secara pasif, tetapi juga diproduksi dan dihidupkan kembali sesuai konteks sosial yang berubah.

Keberlangsungan upacara Ngelamping tidak hanya ditentukan oleh aspek religius, tetapi juga oleh fondasi sosial dan kelembagaan adat yang menopangnya. Desa adat dan subak memainkan peran penting sebagai pengatur dan pengendali, sementara partisipasi masyarakat dalam bentuk ngayah memastikan kohesi sosial tetap terjaga. Sementara itu, pola pembiayaan berbasis gotong royong memperlihatkan kemandirian sekaligus keadilan dalam distribusi tanggung jawab. Keseluruhan konteks ini memperlihatkan bahwa Ngelamping adalah sebuah sistem religio-sosial yang tidak hanya menjaga hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memperkuat identitas, solidaritas, dan keberlanjutan komunitas Bali.

7. Revitalisasi Nilai & Integrasi ke Pengelolaan Pariwisata Budaya

Revitalisasi nilai-nilai Upacara Ngelamping menjadi agenda penting di tengah dinamika modernisasi dan perkembangan pariwisata di Bali. Sebagai sebuah tradisi agraris yang sarat makna sakral, Ngelamping tidak dapat dipandang hanya sebagai peninggalan masa lalu, tetapi sebagai sumber nilai spiritual, etis, dan ekologis yang relevan bagi kehidupan kontemporer. Dalam pandangan kebudayaan Bali, yadnya bukan sekadar ritual simbolis, melainkan cerminan filosofi hidup yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan (Surayin, 2004). Oleh karena itu, revitalisasi Ngelamping dimaksudkan bukan hanya mempertahankan bentuk seremonialnya, melainkan menghidupkan kembali nilai-nilai filosofis yang dikandungnya. Picard, (2006) menegaskan bahwa pariwisata budaya Bali selalu berada dalam ketegangan antara upaya pelestarian tradisi dengan tuntutan komersialisasi, sehingga revitalisasi menjadi jalan tengah untuk memastikan otentisitas budaya tidak hilang ditelan industri pariwisata.

Salah satu strategi revitalisasi yang penting adalah melalui edukasi komunitas. Pendidikan mengenai makna simbolik upacara, nilai kesuburan, serta filosofi yadnya perlu diberikan kepada generasi muda. Ardhana, (2017) menekankan bahwa pelibatan anak-anak dan remaja dalam prosesi ngayah, pembuatan banten, hingga pemahaman makna ritual merupakan kunci keberlanjutan tradisi lintas generasi. Dengan demikian, revitalisasi Ngelamping tidak berhenti pada praktik ritual, melainkan bertransformasi menjadi proses transfer nilai yang menyeluruh. Penguatan awig-awig desa adat dan pemanfaatan wariga dalam menentukan dewasa ayu juga menjadi instrumen penting untuk menjaga kesinambungan praktik ritual di tengah derasnya arus globalisasi.

Selain pendidikan, revitalisasi nilai Ngelamping dapat didorong melalui dokumentasi dan literasi budaya. Windia, (2013) menyatakan bahwa dokumentasi tradisi agraris Bali, termasuk subak dan ritual-ritualnya, berfungsi sebagai media literasi budaya sekaligus instrumen pelestarian. Melalui dokumentasi, generasi mendatang dapat mengakses kembali pengetahuan lokal, bahkan ketika praktik ritual menghadapi tantangan akibat perubahan sosial. Literasi budaya ini juga dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun nonformal, sehingga nilai-nilai religius dan ekologis dalam Ngelamping mendapat ruang pembelajaran yang lebih luas, baik di sekolah maupun di komunitas.

Dalam konteks pariwisata budaya, Ngelamping memiliki potensi besar sebagai warisan budaya takbenda yang dapat dijadikan daya tarik wisata spiritual dan edukatif. Namun, potensi ini perlu dikelola secara hati-hati agar tidak terjebak pada reduksi makna. Butler, (1999) mengingatkan bahwa pariwisata berkelanjutan hanya dapat terwujud jika masyarakat lokal menjadi aktor utama dalam pengelolaan. Prinsip ini menegaskan pentingnya *community-based cultural tourism* (pariwisata budaya berbasis komunitas), di mana ritual Ngelamping tetap dijalankan sesuai makna sakralnya, sementara wisatawan dapat diberikan ruang belajar melalui edukasi, partisipasi simbolis, atau narasi budaya yang disampaikan oleh masyarakat adat.

Model pariwisata berbasis komunitas juga memungkinkan distribusi manfaat ekonomi, sosial, dan kultural yang lebih adil. Masyarakat adat memperoleh keuntungan bukan hanya secara finansial, tetapi juga dalam bentuk penguatan identitas budaya dan solidaritas sosial. Sebaliknya, wisatawan memperoleh pengalaman yang otentik dan bermakna, bukan sekadar tontonan ritual. Strategi integrasi semacam ini sejalan dengan visi pembangunan pariwisata Bali yang menekankan keseimbangan antara pelestarian tradisi dan kebutuhan pembangunan ekonomi (Suryadharma, 2005). Dengan demikian, Ngelamping dapat menjadi model praktik pariwisata budaya yang bermartabat, di mana aspek sakral dan profan mampu berjalan seiring. Lebih jauh, revitalisasi nilai-nilai Ngelamping berfungsi sebagai strategi penguatan identitas religio-kultural Bali. Dalam era globalisasi, identitas lokal sering kali menghadapi tekanan homogenisasi budaya. Melalui revitalisasi, masyarakat Bali menegaskan kembali bahwa nilai-nilai tradisi agraris tidak hanya relevan, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman. Ngelamping dengan simbol kesuburan dan harmoni kosmisnya dapat dijadikan basis etika ekologis, yang sangat relevan menghadapi krisis lingkungan global saat ini. Dengan menempatkan nilai yadnya sebagai dasar etika hidup, masyarakat Bali menunjukkan bahwa tradisi tidak hanya berfungsi sebagai ritual, tetapi juga sebagai pedoman ekologis yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Integrasi nilai-nilai Ngelamping ke dalam pengelolaan pariwisata budaya juga dapat memberikan arah pembangunan yang berkelanjutan. Pariwisata Bali yang selama ini rentan pada eksploitasi budaya dapat diarahkan menuju model pembangunan yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan (Tri Hita Karana). Dalam konteks ini, Ngelamping tidak hanya menjadi ritual agraris, tetapi juga simbol keberlanjutan ekologi, identitas budaya, dan spiritualitas Bali sehingga revitalisasi nilai-nilai Ngelamping bukan sekadar upaya menjaga kelestarian ritual, tetapi merupakan strategi holistik yang mencakup aspek pendidikan, dokumentasi, literasi budaya, dan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas. Revitalisasi ini menegaskan posisi Ngelamping sebagai warisan budaya yang sakral sekaligus relevan bagi tantangan modern, serta memastikan bahwa Bali mampu mengintegrasikan tradisi dengan pembangunan pariwisata secara berkelanjutan dan bermartabat.

Simpulan

Upacara Ngelamping di Bali terbukti tidak hanya berfungsi sebagai ritus agraris, tetapi juga sebagai manifestasi teologis Dewa Yadnya yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, alam, dan komunitas. Melalui simbol-simbol upacara seperti emping, daksina, dan segehan, Ngelamping mengandung makna filosofis yang menegaskan kesadaran religius sekaligus membentuk solidaritas sosial masyarakat agraris. Posisi Ngelamping dalam siklus upacara padi memperlihatkan peranannya sebagai puncak syukur atas panen, yang selaras dengan wariga khususnya Purnamaning Sasih Kedasa sebagai momentum kosmis kesucian. Tata laksana ritus yang melibatkan krama subak, pemangku, dan prajuru desa adat memperlihatkan kekuatan partisipasi komunal, sementara konteks kelembagaan dan mekanisme pembiayaan berbasis gotong royong menjamin kontinuitasnya. Di tengah tantangan globalisasi dan pariwisata, revitalisasi nilai-nilai Ngelamping menjadi strategi penting untuk menjaga otentisitas tradisi sekaligus membuka ruang integrasi dengan pengelolaan pariwisata budaya. Dengan demikian, Ngelamping berkontribusi tidak hanya pada pelestarian identitas religio-kultural Bali, tetapi juga pada penguatan model pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berakar pada kearifan lokal..

Daftar Rujukan

- Ardhana, I. K. (2017). Pendidikan Tradisional Bali dan Transfer Nilai Budaya. Universitas Udayana Press.
- Butler, R. W. (1999). Sustainable tourism: A state-of-the-art review. *Tourism Geographies*, 1(1), 7–25. <https://doi.org/10.1080/14616689908721291>
- Covarrubias, M. (1972). *Island of Bali*. Oxford University Press.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- Hobsbawm, E., & Ranger, T. (1983). *The Invention of Tradition*. Cambridge University Press.
- Koentjaraningrat. (1990). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Dian Rakyat.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Lansing, J. S. (2007). *Priests and Programmers: Technologies of Power in the Engineered Landscape of Bali*. Princeton University Press.
- Picard, M. (2006). *Bali: Cultural Tourism and Touristic Culture*. NUS Press.
- Putra, H. A., Defiana, I., Nastiti, S., & Ekasiwi, N. (2016). Crematorium and Vertical Burial in Surabaya as Solution for Water Absorption in Urban Density Problem. The 2 Nd International Seminar on Science and Technology Postgraduate Program Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Sarita, A. F., & others. (2013). Persepsi Petani Terhadap Penetapan Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia (Studi Kasus Subak Pulagan Kawasan Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar). *E-Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata*, 2(4). <http://ojs.unud.ac.id/index.php/JAA>
- Sivananda, S. (2000). *Bhagavad Gita*. Shivananda Publication.
- Surayin, I. A. P. (2004). *Panca Yadnya*. Paramita.
- Suryadharma, I. G. P. (2005). Nilai-Nilai Kearifan Subak Sebagai Pengetahuan Lokal dalam Perspektif dan Spiritualitas. Universitas Hindu Indonesia.
- Sztompka, P. (2007). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada.
- Titib, I. M. (2003). *Teologi dan Simbol-Simbol dalam Agama Hindu*. Paramita.
- Turner, V. (1970). The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual. *Western Folklore*, 29(2), 134. <https://doi.org/10.2307/1498807>
- Untara, I. M. G. S. (2025). Transformasi Ilmu Wariga Dalam Masyarakat Adat Buleleng Antara Tradisi Dan Modernitas. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 9(3), 88–107. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/JPAH/article/view/4216>
- van Zoest, A. (1993). *Semiotika tentang Tanda, Cara Kerjanya dan Apa yang Kita Lakukan Dengannya*. Yayasan Sumber Agung.
- Wiana, I. K. (1995). *Yadnya dan Bhakti: Persembahan Suci dalam Agama Hindu*. Pustaka Manik Geni.
- Windia, W. (2006). *Transformasi Sistem Subak: Menuju Pertanian yang Berkelanjutan*. Universitas Udayana Press.
- Windia, W. (2013). Penguatan budaya subak melalui pemberdayaan petani. *Jurnal Kajian Bali*, 3(2), 189–206.
- Windia, W., Pusposutardjo, S., Sutawan, N., Sudira, P., & Arif, S. P. (2005). Transformasi Sistem Irigasi Subak Yang Berlandaskan Konsep Tri Hita Karana. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 5(2), 1–15.